

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)**



**BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 Biro Hukum provinsi Sumatera Barat ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Padang, 2022

KEPALA BIRO HUKUM

EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19741031 199803 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I DATA/ INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN BIRO HUKUM	1
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH BIRO HUKUM	2
2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	
2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran	
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	
2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN	16
2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	16
1. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
2. Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ	
3. Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi	
2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA	19
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	20
3.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN	
1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya	
2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya	
3.2. HAMBATAN/ PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN	
1. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya	
2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya	
BAB IV PENUTUP	21

BAB I

DATA/INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN BIRO HUKUM

I. PENDAHULUAN

Biro Hukum merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Biro Hukum mempunyai tugas untuk penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan perumusan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum.
2. Penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum.
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum.
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN BIRO HUKUM

2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Biro Hukum Pada Tahun Anggaran 2021 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.365.260.990,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.086.460.998,- atau 88.21% dengan uraian sebagai berikut :

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja
Pada Perjanjian Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
I	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah produk Hukum Yang Ditetapkan	Perda : 12 Pergub : 85 Kepgub : 750 Draft/ rancangan produk hukum daerah kab/kota : 70 Ranperda kab/kota : 17 Perda kab/kota : 3 Pert KDH & DPRD kab/kota : 15	Perda : 11 Pergub : 52 Kepgub: 1059 Draft/ rancangan produk hukum daerah kab/kota : 66 Ranperda kab/kota : 16 Perda kab/kota : 0 Pert KDH & DPRD kab/kota : 24	97.99% 87%
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Kasus Yang Ditangani	Perkara : 7	Perkara : 12	171%
		Jumlah Bantuan Advokasi Hukum Yang Ditetapkan	Bantuan advokasi : 4	Bantuan : 4	100%

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
		Jumlah unit kerja, kab/kota yang memenuhi indikator RANHAM	Unit kerja provinsi : 7 Kab/kota : 19	Unit kerja provinsi : 7 Kab/kota : 19	100%
II	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B (69.26)

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
 2. Kolom 2: Diisi dengan Program yang dilaksanakan;
 3. Kolom 3: Diisi dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian kinerja;
 4. Kolom 4: Diisi dengan Target Kinerja dalam Perjanjian kinerja;
 5. Kolom 4: Diisi dengan Realisasi Target Kinerja;
 6. Kolom 5: Diisi dengan Persentase antara Target kinerja dengan realisasi.
2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah						

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		85%	100%	100%	17.647.700	17.532.700	99.35%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 bulan	12 bulan	100%	134.456.650	122.847.650	91.37%
3.	Administrasi BMD pada Perangkat Daerah		12 bulan	12 bulan	100%	17.071.700	16.114.950	94.40%
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	100%	76.100.600	73.270.000	96.28%
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 bulan	12 bulan	100%	311.137.423	290.765.036	93.45%
6.	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	119.637.480	112.494.126	94.03%
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 bulan	12 bulan	100%	2.626.600	2.014.585	76.70%
8.	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan		100%	100%	100%	69.187.600	64.931.475	93.85%

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemerintah Daerah							
II	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah						
1.	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan		90%	92.49%	92.49%	1.231.875.637	1.137.539.373	92.34%
2.	Fasilitasi Bantuan Hukum		90%	123.67%	123.67%	385.519.600	248.951.103	64.57%

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi dengan Program/Kegiatan yang dilaksanakan;
3. Kolom 3: Diisi dengan Peraturan yang melandasi penyelenggaraan program dan kegiatan tersebut;
4. Kolom 4: Diisi dengan Target dalam dokumen anggaran;
5. Kolom 5: Diisi dengan Realisasi Target dalam dokumen anggaran;
6. Kolom 6: Diisi dengan Persentase antara Target dengan realisasi.
7. Kolom 7 : Diisi dengan Alokasi Anggaran
8. Kolom 8 : Diisi dengan Realisasi Anggaran
9. Kolom 9 : Diisi dengan Persentase Realisasi

Tabel 2.3

Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5
I	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
3.	Administrasi BMD pada Perangkat Daerah			
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
6.	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
8.	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
II.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			
1.	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Masih adanya produk hukum daerah yang belum harmonis dengan peraturan	Inventarisir produk hukum daerah yang belum harmonis dengan	

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5
		perundang-undangan yang lebih tinggi Sosialisasi peraturan perundang-undangan terbaru beserta pendanaannya yang masih terbatas	peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Mengadakan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan lingkup provinsi, dan kab/kota	
2.	Fasilitasi Bantuan Hukum	Masih kurangnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi masyarakat dan pemerintah Sosialisasi dan advokasi terhadap masyarakat dan pemerintah yang masih rendah	Mengupayakan akses dan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat dan pemerintah Mengadakan sosialisasi dan advokasi terhadap masyarakat dan pemerintah yang masih rendah	

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
 2. Kolom 2: Diisi dengan Program/Kegiatan yang dilaksanakan;
 3. Kolom 3: Diisi dengan Permasalahan masing-masing Program/Kegiatan;
 4. Kolom 4: Diisi dengan Upaya mengatasi permasalahan;
 5. Kolom 4: Diisi dengan penjelasan yang menunjukkan apabila program dan kegiatan tersebut merupakan program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjawab Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2021;
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja
 - a. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dicapai dengan dukungan kegiatan :
 1. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan, Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan dan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan dengan output

kegiatan sbb: 11 Perda, 52 Peraturan Gubernur, 1059 Keputusan Gubernur.

No.	Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
1.	Peraturan Daerah	12	11	91.6%
2.	Peraturan Gubernur	85	52	61.17%
3.	Keputusan Gubernur	750	1059	141.2%

2. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan, Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota, dengan output kegiatan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
1.	Draft/rancangan produk hukum daerah kab/kota	70	66	94.28%
2.	Ranperda kab/kota	17	16	94.11%
3.	Perda kab/kota	3	0	0
4.	Peraturan KDH & DPRD kab/kota	15	24	160%

3. Fasilitasi Bantuan Hukum, dengan output kegiatan ini :

Tersalurkannya bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin pada tahun 2021 dari target yang ditetapkan sebanyak 4 bantuan, dapat terealisasi sebanyak 4 bantuan yang berasal dari 4 kantor/organisasi bantuan hukum yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FIAT JUSTITIA BATUSANGKAR, Perkumpulan Kantor Hukum FIAT JUSTITIA, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN KOTA SOLOK) dan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN KOTO BARU).

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang RANHAM 2021-2025 yang merupakan RANHAM Generasi V berfokus dan berorientasi pada pemenuhan (4) empat sasaran kelompok, yaitu : Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas dan Kelompok Masyarakat Adat. Sebagai sebuah dokumen teknokratik dan amanat Presiden Indonesia, RANHAM harus dilaksanakan disemua jenjang pemerintahan daerah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Maka untuk itu perlu dilakukan Monev dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai sarana bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk

meningkatkan koordinasi antar lembaga/instansi dalam pelaksanaan kegiatan supremasi hukum dan perlindungan HAM.

Kegiatan Monev dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai sarana bagi aparatur Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memberikan motivasi dalam melaksanakan amanat Undang-Undang 1945 pasal 28 I ayat (4) yang menyatakan bahwa Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan di atas, maka dilakukan Koordinasi tindak lanjut pelaksanaan RANHAM ke Ditjen Hak Asasai Manusia di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta.

Untuk tahun 2021 program/kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kab/Kota Peduli HAM (KKP HAM) Tahun 2021 **ditiadakan**, dan baru akan dilaksanakan kembali tahun 2022.

**REKAPITULASI PENANGANAN
PERKARA LITIGASI
PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT
TAHUN 2021**

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	KETERANGAN
		PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON				
	1	2	3	4	5	6	7
	PERKARA TATA USAHA NEGARA						
1.	Perkara TUN No. 10/G/2019/PTUN-PDG	Yulinazra, SP.MT	Gubernur Sumatera Barat	Keputusan Gubernur Sumatera Barat No.862/4241/BKD-2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.	Inkracht	Peninjauan Kembali (Penggugat)	Putusan MA RI tanggal 5 Agustus 2021 No. 90/PK/TUN/2021 : Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PK Yulinazra,SP. MT
2.	Perkara TUN No. 39/G/2021/PTUN.PDG	Herman Sofyan, S.E	Gubernur Sumatera Barat	1. Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor 171-730-2021 tentang Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi tertanggal 20 September 2021; 2. Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor 171-731-2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi tertanggal 20 September 2021.	Dalam proses persidangan		

				3.			
	PERKARA PERDATA						
3.	Perkara No.566/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim (PN. Jakarta Timur)	Sunanto Santoso	- Kepala Kantor Penghubung (Tergugat I) - Gubernur Sumatera Barat (Tergugat II)	Perbuatan Wanprestasi (Pembangunan Kantor Penghubung Prov.Sumbar / Hotel Balairung)	Dalam Proses Peninjauan Kembali	Peninjauan Kembali (PK) Oleh Penggugat	
4.	Perkara No. 15/Pdt.G/2021/PN.PMN (PN. Padang)	Armen	Kadis PUPR Provinsi Sumatera Barat (Turut Tergugat)	Perbuatan Melawan Hukum (Perampasan dan penguasaan serta pengolahan secara sepihak tanah objek perkara oleh Tergugat)	Dalam Proses Persidangan	-	
5.	Perkara No. 39/Pdt.G/2021/PN.PMN (PN. Pariaman)	Sahar, dkk	Gubernur Sumatera Barat (Tergugat IV)	Perbuatan Melawan Hukum (kepemilikan tanah)	Dalam Proses Persidangan		
6.	Perkara No. 40/Pdt.G/2021/PN.PMN (PN. Pariaman)	Jamalis Buyung Tupai, dkk	Gubernur Sumatera Barat (Tergugat IV)	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah terkait Pembayaran Ganti Rugi lahan pembangunan jalan tol)	Dalam Proses Persidangan		
7.	Perkara No.41/Pdt.G/2021/PN.PMN (PN. Pariaman)	Zulbahri, SH	Gubernur Sumatera Barat (Tergugat 11)	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah terkait Pembayaran Ganti Rugi lahan pembangunan jalan tol)	Dalam Proses Persidangan	-	
8.	Perkara No.68/Pdt.G/2021/PN.PM	Masrizal	Gubernur Sumatera Barat	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah terkait	Dalam Proses		

	N (PN. Pariaman)		(Tergugat 7)	Pembayaran Ganti Rugi lahan pembangunan jalan tol)	Persidangan		
9.	Perkara No.17/Pdt.G/2021/PN.BSK (PN. Batusangkar)	Anas Adam	- Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat - Gubernur Sumatera Barat (Turut Tergugat)	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan Tanah atas bangunan SMAN I Rambatan)	Dalam Proses Persidangan		
10.	Perkara No.14/Pdt.G/2021/PN.Tjp (PN. Tanjung Pati)	Drs. Efrizal Dt.Rajo Mangkuto Nan Lujua	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (Tergugat IV)	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan Tanah atas Bangunan SMAN 1 Guguk Kab. Lima Puluh Kota)	Dalam Proses Persidangan		
11.	Perkara No.78/Pdt.G/2021/PN.PMN (PN. Pariaman)	Anton, dkk	Gubernur Sumatera Barat (Turut Tergugat H)	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah yang terletak di Korong Gunung Kanter, Kenagarian Sungai Buluh Selatan, Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman dengan luas ± 3.200 M ²)	Dalam Proses Persidangan		
12.	Perkara No.10/Pdt.G/2021/PN.Plj (PN. Pulau Punjung)	Burhanudin Ninik Saga Jantan, dkk	Gubernur Sumatera Barat (Turut Tergugat III)	Perbuatan melawan Hukum (Kepemilikan HGU atas PT. Tidar Kerinci Agung)	Dalam Proses Persidangan		

- b. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dicapai dengan dukungan kegiatan :
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Daerah
 3. Administrasi BMD pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 6. Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 8. Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil selama Tahun 2021 dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis pada Biro Hukum sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
Kebijakan Strategis Biro Hukum Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1			
TIDAK ADA			
2	Dst		

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi kebijakan strategis yang diprakarsai oleh perangkat daerah;
3. Kolom 3: Diisi peraturan tentang kebijakan strategis tersebut berupa Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan terbitnya kebijakan strategis tersebut.

2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi DPRD, Pansus LKPJ, dan Fraksi atas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Biro Hukum telah ditindaklanjuti dengan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tindak Lanjut rekomendasi DPRD

Tabel 2.5
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Pemerintah Daerah perlu segera menyiapkan Peraturan Gubernur terkait dengan amanat yang ditetapkan dalam Perda-Perda Provinsi Sumatera Barat, agar Perda-Perda tersebut dapat langsung dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dan disamping itu, Pemerintah Daerah juga perlu menyegerakan perubahan dari beberapa Peraturan Gubernur terkait dengan pengaturan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, hibah dan bansos serta Peraturan Gubernur tentang Pemberian Beasiswa Yang Bersumber dari dana PT. Rajawali Corp.	Untuk Pergub tentang Hibah dan Pergub Bansos sebagai tindak lanjut dari Permendagri no 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah telah ditetapkan. Terkait dengan Pergub tentang Pemberian Beasiswa Yang Bersumber dari dana PT. Rajawali telah ditetapkan dengan Pergub Nomor 1 Tahun 2020. Terkait dengan Pergub sebagai peraturan pelaksana dari perda yang belum ditetapkan akan segera dilakukan koordinasi dengan OPD pemrakarsa agar segera menyiapkan rancangan peraturan gubernur dimaksud.	

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Sumatera Barat ATA 2020 yang ditujukan pada dinas terkait;
3. Kolom 3: Diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD yang ditujukan pada dinas/biro tersebut;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan adanya program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD.

2. Tindak lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ

Tabel 2.6
Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ DPRD
Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020

No	Rekomendasi Pansus LKPJ Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Pemerintah Daerah perlu segera menyiapkan Peraturan Gubernur terkait dengan amanat yang ditetapkan dalam Perda-Perda Provinsi Sumatera Barat, agar Perda-Perda tersebut dapat langsung dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dan disamping itu, Pemerintah Daerah juga perlu menyegerakan perubahan dari beberapa Peraturan Gubernur terkait dengan pengaturan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, hibah dan bansos serta Peraturan Gubernur tentang Pemberian Beasiswa Yang Bersumber dari dana PT. Rajawali Corp.	Untuk Pergub tentang Hibah dan Pergub Bansos sebagai tindak lanjut dari Permendagri no 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah telah ditetapkan. Terkait dengan Pergub tentang Pemberian Beasiswa Yang Bersumber dari dana PT. Rajawali telah ditetapkan dengan Pergub Nomor 1 Tahun 2020. Terkait dengan Pergub sebagai peraturan pelaksana dari perda yang belum ditetapkan akan segera dilakukan koordinasi dengan OPD pemrakarsa agar segera menyiapkan rancangan peraturan gubernur dimaksud.	

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Rekomendasi Pansus LKPJ atas LKPJ Gubernur Sumatera Barat ATA 2019 yang ditujukan pada dinas terkait;
3. Kolom 3: Diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD yang ditujukan pada dinas/biro tersebut;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan adanya program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD.

3. Tindak Lanjut rekomensai Fraksi

Tabel 2.7
Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi DPRD
Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019

No	Rekomendasi Fraksi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	TIDAK ADA		
2.			
3.			

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Rekomendasi Fraksi atas LKPJ Gubernur Sumatera Barat ATA 2020 yang ditujukan pada dinas terkait;
3. Kolom 3: Diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD yang ditujukan pada dinas/biro tersebut;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan adanya program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD.

2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Dalam penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 menerima penghargaan di tingkat nasional, antara lain :

Tabel 2.8
Penghargaan yang Diraih Tahun 2021

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan
1	2	3	4	5
		TIDAK ADA		

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Nama penghargaan;
3. Kolom 3: Diisi nama pemberi penghargaan dan lembaga pemberi penghargaan;
4. Kolom 4: Diisi Perangkat Daerah Penerimaan Penghargaan;
5. Kolom 5: Diisi tempat dan tanggal penerimaan penghargaan;

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS
PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

NIHIL

BAB IV PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2021 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

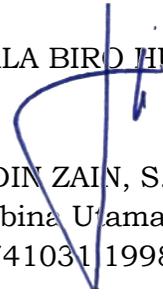
Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2021 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Sumatera Barat pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2021, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.

KEPALA BIRO HUKUM


EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19741031 199803 1 004